



Pengaruh Ketimpangan Kesejahteraan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera

Muhammad Khairul Nawwari^{1*}, Anna Yulianita², Syawal Novaliansyah³, Muhammad Rizky Putra Ramadhan⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: khairln0307@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effect of welfare inequality on poverty levels on the island of Sumatra. Welfare inequality is measured using the Gini Index, while poverty levels are measured by the percentage of the poor population at the provincial level. This study uses a quantitative method with a panel data approach covering ten provinces on the island of Sumatra during the period 2020–2024. The analytical techniques used include panel data regression with fixed and random effects models, as well as classical assumption testing to ensure model validity. The results show that welfare inequality has a positive and significant effect on poverty levels, meaning that increasing inequality in income distribution tends to increase the number of poor people. This finding indicates that uneven economic growth can worsen the welfare of the community, especially low-income groups. Therefore, more inclusive and sustainable development policies are needed, particularly in increasing equitable access to education, health services, and productive employment opportunities to reduce inequality and poverty levels on the island of Sumatra.*

Keywords: *Economic Growth; HDI; Poverty; Sumatra; Welfare Inequality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan kesejahteraan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Ketimpangan kesejahteraan diukur menggunakan Indeks Gini, sedangkan tingkat kemiskinan diukur melalui persentase penduduk miskin pada tingkat provinsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel yang mencakup sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2020–2024. Teknik analisis yang digunakan meliputi regresi data panel dengan model efek tetap dan efek acak, serta pengujian asumsi klasik guna memastikan validitas model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam peningkatan pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja produktif untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Pulau Sumatera.

Kata kunci: HDI; Kemiskinan; Ketidaksetaraan Kesejahteraan; Pertumbuhan Ekonomi; Sumatera.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Aryanti & Sukardi, 2024). Kemiskinan tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak (Yunita & Gultom, 2025). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan menjadi isu krusial karena memengaruhi bagaimana hasil pembangunan terdistribusi di dalam masyarakat (Mardhiyah, 2025). Ketimpangan ini dapat tercermin dari perbedaan tingkat pendapatan, akses layanan publik, serta kesempatan ekonomi antar kelompok sosial dan wilayah. Ketimpangan yang tinggi dapat

menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tertinggal, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Kondisi ini berpotensi memperlambat penurunan angka kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi secara agregat menunjukkan peningkatan.

Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan strategis dalam perekonomian Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan peran penting dalam sektor perkebunan, pertambangan, serta industri pengolahan. Namun, perkembangan antarwilayah di Sumatera menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan, baik dari sisi kesejahteraan maupun tingkat kemiskinan (Aza & Nsyah2, 2024). Beberapa provinsi menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif tinggi, sementara provinsi lainnya masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup besar.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk menganalisis pengaruh ketimpangan kesejahteraan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, baik dari sisi hubungan jangka pendek maupun jangka panjang (Satriawan et al., 2025). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pembangunan wilayah serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini juga menjadi penting dalam menjawab kesenjangan pembangunan antar daerah dan memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Mustika & Nurjanah, 2021).



Gambar 1. Sebaran Kemiskinan di pulau Sumatera.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah (2025)

Berdasarkan Gambar 1, Peta kemiskinan di Pulau Sumatera menunjukkan adanya variasi tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antar provinsi. Wilayah bagian utara dan barat, yang

ditandai dengan warna lebih gelap, menggambarkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini umumnya terkait dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, rendahnya diversifikasi ekonomi, serta ketergantungan pada sektor-sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi (Hamzah et al., 2022).

Sementara itu, provinsi di bagian tengah dan selatan Sumatera tampak memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, tercermin dari warna yang lebih terang. Wilayah ini cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam, pertumbuhan industri yang lebih kuat, serta akses yang lebih baik terhadap pusat layanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Satriawan et al., 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan tidak terdistribusi secara merata di seluruh Pulau Sumatera.

Secara keseluruhan, peta tersebut menegaskan adanya ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Sumatera. Ketimpangan ini dapat menjadi indikator adanya perbedaan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, menarik investasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. sebagaimana ditegaskan dalam analisis spasial sebelumnya (Shalma et al., 2025). Oleh karena itu, hasil visualisasi ini penting sebagai dasar analisis untuk memahami karakteristik wilayah dan merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Pulau Sumatera.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya produktif seperti pendidikan, modal, dan kesempatan kerja. akses terhadap pendidikan, modal, dan kesempatan kerja menjadi bagian dari indikator kemiskinan multidimensional (Suresh, 2023). (Attoma & Matteucci, 2024) menjelaskan bahwa kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya produktif seperti pendidikan, modal, dan kesempatan kerja. Dalam konteks ekonomi regional, kemiskinan sering kali mengakar karena ketidakseimbangan pembangunan, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya diversifikasi ekonomi daerah (Shodiq et al., 2025). Tingkat kemiskinan di suatu daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

Konsep Ketimpangan Kesejahteraan Berbasis IPM

Ketimpangan kesejahteraan berbasis IPM diartikan sebagai perbedaan tingkat kualitas hidup antarwilayah yang tercermin dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar dan peluang peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, mutu pendidikan, serta kesempatan kerja yang produktif. Semakin besar kesenjangan nilai IPM, semakin tinggi tingkat ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, yang pada akhirnya dapat memperlebar jarak sosial dan ekonomi di suatu wilayah serta meningkatkan risiko eksklusi sosial bagi kelompok rentan. Ketika pertumbuhan tidak inklusif, manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat (Destaria & Ginting, 2023).

Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan kemiskinan

Pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat terlebih dahulu sebelum akhirnya menurun, seiring pendapatan per kapita dan struktur ekonomi yang mulai merata sebuah pola yang dikenal sebagai kurva Kuznets yang menggambarkan hubungan berbentuk U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan (Madsen & Strulik, 2025). Ketimpangan pendapatan yang tinggi memiliki potensi menghambat penurunan kemiskinan, karena sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki akses memadai terhadap modal, pendidikan, atau kesempatan kerja produktif (Marrero & Servén, 2022). Kondisi tersebut memperlebar kesenjangan sosial mobilitas sosial menjadi rendah, sehingga kelompok rentan sulit keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang (Cerra et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan terhadap kemiskinan di pulau Sumatera. Sampel yang digunakan mencakup observasi antar-unit wilayah Sumatera dengan rentang waktu 2020– 2024, yang diperoleh dari Badan pusat statistik dan Data Books. Rincian Operasional variabel yang digunakan dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel.

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Sumber
Ketimpangan Kesejahteraan	IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita).	Persentase%	BPS
Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar secara layak, diukur melalui persentase penduduk miskin berdasarkan Garis Kemiskinan yang ditetapkan BPS.	Persentase (%)	BPS

Sumber: Badan Pusat statistik dan Data Book (2025)

Penelitian ini menerapkan regresi data panel untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan secara matematis dalam Persamaan. yang menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen dan dependen (Fitria et al., 2020).

$$\text{Kemiskinan} = \alpha + \beta_1 \text{Pertumbuhan Ekonomi}_i + \beta_2 \text{Ketimpangan Kesejahteraan}_i + \varepsilon_i$$

Dijelaskan bahwa, nilai α berfungsi sebagai konstanta yang menunjukkan tingkat Kemiskinan ketika kedua variabel independen berada pada nilai nol. Koefisien β_1 Pertumbuhan Ekonomi, β_2 Ketimpangan Kesejahteraan, dan ε_i komponen eror (Fitria et al., 2020).

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). FEM memiliki berbagai keunggulan dalam kemampuannya untuk mengurangi potensi bias dari variabel yang tidak terdeteksi antar entitas. Untuk memilih metode pendekatan FEM, penelitian ini telah melakukan uji Chow, Uji Hausman, dan LM test. Untuk memastikan kestabilan model regresi, dilakukan pemeriksaan terhadap stasioneritas serta uji asumsi klasik, guna memastikan validitas dan realibilitas hasil penelitian (Karuna et al., 2024).

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian mengambil tempat di Pulau Sumatera

4. HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Sebaran Kemiskinan di Pulau Sumatera



Gambar 2. Sebaran Kemiskinan di Pulau Sumatera.

Sumber: BPS Indonesia (2025), diolah menggunakan ArcGIS (2025)

Berdasarkan peta sebaran kemiskinan di Pulau Sumatera, terlihat bahwa kondisi kemiskinan tidak merata di seluruh provinsi. Beberapa provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, sementara provinsi lain termasuk dalam kategori rendah. Provinsi di bagian selatan Pulau Sumatera, seperti Lampung dan Bengkulu, tampak berada pada kelas kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut masih cukup besar (Hamzah et al., 2022).

Di sisi lain, provinsi seperti Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau berada pada kelas kemiskinan yang lebih rendah (Santi et al., 2020). Kondisi ini dapat mencerminkan perkembangan ekonomi yang relatif lebih baik, termasuk kontribusi sektor industri dan perdagangan yang kuat di wilayah tersebut. Sumatera Utara dan Sumatera Selatan berada pada kategori menengah, menunjukkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi berjalan, masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan ekonomi (Hamzah et al., 2022).

Secara keseluruhan, peta ini memperlihatkan adanya ketimpangan spasial kemiskinan di Pulau Sumatera. Wilayah dengan akses ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, sedangkan daerah yang masih mengandalkan sektor primer atau

memiliki infrastruktur yang kurang berkembang cenderung menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah sesuai kondisi wilayah masing-masing (Satriawan et al., 2025).

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel yang terdiri dari 10 kabupaten/kota di wilayah Sumatera selama lima tahun pengamatan dari 2020–2024 sehingga total observasi penelitian sebanyak 50 data. Penggunaan data panel dipilih karena kombinasi data cross-section & time-series memberikan estimasi yang lebih kaya dan valid. Dengan panel data, kita bisa mengontrol efek individual tetap (fixed effects) masing-masing kabupaten/kota sehingga bias akibat variabel tak terobservasi dapat diminimalkan. kombinasi data cross-section & time-series memberikan estimasi yang lebih kaya (Firdaus et al., 2021).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen (Y) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen (X). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pengujian model terbaik melalui Uji Chow dan Uji Hausman (Samiani et al., 2024).

Tabel 2. Deskriptif Statistik.

	Y	X
Mean	9.213400	0.626600
Median	7.855000	0.545000
Maximum	15.53000	1.800000
Minimum	4.400000	0.030000
Std. Dev.	3.557027	0.320131
Skewness	0.368096	1.004223
Kurtosis	1.694900	4.886505
Jarque-Bera	4.677633	15.81825
Probability	0.096442	0.000367
Sum	460.6700	31.33000
Sum Sq. Dev.	619.9697	5.021722
Observations	50	50

Sumber: Eviews 12 data diolah (2025)

Statistik deskriptif menunjukkan karakteristik data sebelum dilakukan analisis regresi. Variabel kemiskinan (Y) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 9.213, dengan nilai minimum 4.40, nilai maksimum 15.53, dan standar deviasi 3.557. Hal ini menggambarkan bahwa

terdapat disparitas tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antar daerah. Dengan kata lain, masih terdapat daerah yang mengalami tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga isu kesejahteraan di Sumatera masih membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu variabel pertumbuhan ekonomi (X) memiliki nilai rata-rata 0.626, nilai minimum 0.03, nilai maksimum 1.80, dan standar deviasi 0.320. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi antar daerah berbeda-beda. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kinerja ekonomi yang dapat mempengaruhi efektivitas hasil pembangunan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Melalui hasil uji normalitas Jarque-Bera, variabel tingkat kemiskinan menunjukkan nilai probabilitas $0.096 > 0.05$, sehingga berdistribusi normal, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil $0.00036 < 0.05$, sehingga tidak berdistribusi normal. Namun dalam regresi panel menggunakan GLS, ketidaknormalan dapat ditoleransi karena estimator tetap konsisten dan tidak bias.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas.

	Y	X
Y	1	0.04916
X	0.04916	1

Sumber: Eviews 12 data diolah (202)

Hasil korelasi antar variabel menunjukkan nilai 0.049, jauh di bawah batas toleransi multikolinearitas 0.8, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian model sudah memenuhi kriteria kelayakan dan dapat dilanjutkan pada tahap regresi panel.

Uji Chow

Tabel 4. Uji Chow.

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	203.62705	6	0.000
		(9,39)	0
Cross-section Chi-square	193.55052	8	0.000
		9	0

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model Fixed Effect lebih tepat dibandingkan Common Effect. Hasil menunjukkan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$, berarti Fixed Effect lebih tepat daripada Common Effect, sehingga model mengakui adanya perbedaan karakteristik individual antar daerah.

Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman.

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.719593	1	0.0538

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect. Hasil menunjukkan nilai probabilitas $0.0538 > 0.05$, sehingga model terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model (REM). Hal ini berarti variasi antar unit cross-section dianggap bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen, sehingga lebih efisien digunakan.

Uji Cointegration

Tabel 6. Uji Cointegration.

	Statistic		Weighted	
	Statistic	Prob.	Statistic	Prob.
Panel v-Statistic	3.012773	0.0013	2.053333	0.0200
Panel rho-Statistic	0.010236	0.5041	0.126742	0.4496
Panel PP-Statistic	1.101656	0.1353	2.405652	0.0081

Hasil uji cointegrasi menunjukkan bahwa Panel v-Statistic dan Panel PP-Statistic memiliki probabilitas signifikan yaitu masing-masing 0.0013 dan 0.0081, sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan jangka panjang (long-run relationship) antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Artinya perubahan dalam pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap perubahan kemiskinan tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang secara stabil dan berkelanjutan (Wandita et al., 2022).

Uji Heterokedastisitas

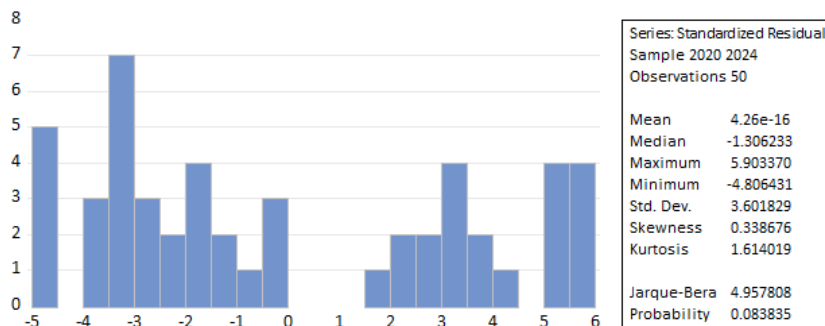
Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
 Equation: UNTITLED
 Specification: Y C X
 Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	35.25648	10	0.0001

Gambar 3. Uji Heterokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai varians residual berada dalam kondisi stabil atau homogen, yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Ketika tidak terjadi heteroskedastisitas, maka model regresi panel ini dapat dikatakan reliabel dan menghasilkan estimator yang efisien (BLUE – Best Linear Unbiased Estimator). Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data pada variabel dependen tidak dipengaruhi oleh tingkat varians yang berbeda, sehingga hasil estimasi koefisien regresi dapat dipercaya dan valid digunakan untuk pengambilan keputusan.

Uji Normalitas



Gambar 4. Uji Normalitas.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera, diperoleh nilai probabilitas untuk variabel tingkat kemiskinan (Y) sebesar 0.096442, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel Y berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas dalam model regresi. Distribusi data yang normal menunjukkan bahwa model regresi data panel yang digunakan layak untuk diterapkan dalam penelitian ini dan hasil estimasi yang diperoleh dapat dipercaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan signifikan terhadap asumsi normalitas pada variabel dependen dalam penelitian ini.

Hasil Estimasi Regersi**Tabel 7.** Uji Cointegration.

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/09/25 Time: 22:09
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficie		t-Statistic	Prob.
	nt	Std. Error		
C	10.03125	1.044678	9.602234	0.0000
X	-1.305211	0.268563	-4.859987	0.0000
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		3.250269	0.9697	
Idiosyncratic random		0.574842	0.0303	
Weighted Statistics				
Root MSE	0.578963	R-squared	0.317726	
Mean dependent var	0.726456	Adjusted R-squared	0.303512	
S.D. dependent var	0.708041	S.E. of regression	0.590902	
Sum squared resid	16.75993	F-statistic	22.35300	
Durbin-Watson stat	1.308212	Prob(F-statistic)	0.000020	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.025349	Mean dependent var	9.213400	
Sum squared resid	635.6855	Durbin-Watson stat	0.034491	

Berdasarkan hasil pengujian uji t pada model Random Effect, variabel pertumbuhan ekonomi (X) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -1.305 dengan nilai probabilitas 0.0000, yang lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara ekonometrika, hasil ini berarti bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.305 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga peningkatan kinerja ekonomi daerah menjadi strategi

efektif dalam upaya menekan angka kemiskinan.

Pembahasan

Ketimpangan Kesejahteraan sebagai Determinan Struktural Kemiskinan di Pulau Sumatera

Ketimpangan kesejahteraan merupakan faktor struktural yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan di Pulau Sumatera. Meskipun beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, belum seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja menciptakan hambatan bagi kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kemiskinan cenderung bertahan di wilayah tertentu (Haemmerli et al., 2021).

Provinsi yang masih memiliki kualitas pembangunan manusia rendah seperti Bengkulu, Aceh, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Utara, umumnya juga memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan peluang ekonomi menjadi faktor utama yang memperkokoh kemiskinan struktural. Daerah yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan menghadapi tantangan lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan kompetitif di pasar tenaga kerja (Muttaqin, n.d.).

Sebaliknya, provinsi dengan tingkat kesejahteraan lebih baik seperti Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat berhasil menekan kemiskinan melalui kualitas pembangunan manusia yang lebih tinggi serta akses ekonomi yang lebih luas. Ketersediaan lapangan kerja formal, industrialisasi, dan konektivitas wilayah yang baik memungkinkan penyebaran manfaat pembangunan secara lebih merata dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer (Safrinja et al., 2025).

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa ketimpangan dalam kualitas hidup merupakan bentuk *capability deprivation*, yaitu keterbatasan kapabilitas individu dalam mencapai kesejahteraan yang layak. Ketimpangan kesejahteraan pada akhirnya membatasi mobilitas sosial dan memperlambat penurunan angka kemiskinan, bahkan ketika ekonomi suatu wilayah sedang tumbuh.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketimpangan kesejahteraan adalah determinan struktural yang memperkuat lingkaran kemiskinan di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menysasar akar struktural masalah melalui peningkatan

kualitas SDM, pemerataan layanan publik, dan penguatan inklusivitas pembangunan antarwilayah (Rahayu et al., 2020).

Pengaruh Ketimpangan Kesejahteraan terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.305 persen. Temuan ini selaras dengan teori trickle-down effect yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah (Iffah et al., 2023).

Namun, peta sebaran kemiskinan menunjukkan adanya kondisi yang belum merata antarprovinsi. Provinsi Lampung, Bengkulu, dan sebagian wilayah Sumatera Utara masih berada pada kategori kemiskinan tinggi (Aza & Nsyah2, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Daerah yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan lebih rentan terhadap gejolak harga komoditas, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya tidak stabil (Satriawan et al., 2025).

Sebaliknya, provinsi seperti Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah (Aza & Nsyah2, 2024). Struktur ekonomi di wilayah tersebut lebih terdiversifikasi, dengan kontribusi sektor industri dan perdagangan yang lebih besar, sehingga mampu menciptakan peluang kerja produktif dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh struktur ekonomi dan kualitas pembangunan manusia di setiap wilayah (Muttaqin, n.d.).

Selain itu, berdasarkan hasil statistik deskriptif, terlihat bahwa terdapat disparitas yang cukup besar dalam tingkat kemiskinan antarprovinsi, yang tercermin dari nilai standar deviasi yang tinggi. Ketimpangan spasial ini mencerminkan perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan menyerap investasi, ketimpangan antarwilayah akan meningkat sebelum akhirnya menurun ketika pertumbuhan ekonomi semakin merata dan inklusif (Iffah et al., 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mengurangi kemiskinan apabila tidak diiringi pemerataan distribusi manfaat

pembangunan. Oleh karena itu, Sumatera membutuhkan strategi pembangunan yang lebih inklusif, terutama melalui, peningkatan kualitas SDM, penguatan akses infrastruktur wilayah tertinggal, dan pemberdayaan sektor produktif yang menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana hasil pembangunan tersebut terdistribusi secara merata ke seluruh provinsi di Pulau Sumatera (Hafizi, 2023).

Keterkaitan antara Peta Sebaran Kemiskinan dan Hasil Regresi

Analisis spasial pada peta sebaran kemiskinan di Pulau Sumatera menunjukkan adanya variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi. Provinsi seperti Bengkulu, Lampung, serta beberapa bagian Sumatera Utara tampak berada pada kelas kemiskinan tinggi. Sebaliknya, (Aryanti & Sukardi, 2024) wilayah dengan struktur ekonomi lebih terdiversifikasi seperti Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah (Shodiq et al., 2025).

Temuan ini berkaitan erat dengan hasil regresi panel yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Hafizi, 2023). Artinya, provinsi yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih baik akan menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih efektif. Kondisi ini terlihat jelas dari wilayah yang memiliki pusat industri dan kegiatan perdagangan, karena meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Hamzah et al., 2022).

Di sisi lain, wilayah yang masih didominasi sektor primer memiliki produktivitas yang cenderung rendah dan rentan terhadap fluktuasi pasar komoditas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak secara optimal mengalir ke kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Aryanti & Sukardi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif di seluruh wilayah Sumatera.

Dengan demikian, keterkaitan antara hasil regresi dan peta sebaran kemiskinan mengindikasikan bahwa perbedaan struktur ekonomi wilayah menjadi faktor utama penyebab variasi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Pembangunan ekonomi yang lebih merata dan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam menekan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera (Mardhiyah, 2025).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera melalui pendekatan spasial dan ekonometrika data panel. Berdasarkan visualisasi peta sebaran kemiskinan, ditemukan adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang signifikan antarprovinsi. Provinsi yang masih bergantung pada sektor primer dan memiliki akses infrastruktur terbatas cenderung memiliki kemiskinan yang lebih tinggi, terutama di wilayah Bengkulu, Lampung, dan beberapa bagian Sumatera Utara. Sementara itu, provinsi dengan struktur ekonomi yang lebih beragam seperti Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hasil regresi dengan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, semakin rendah tingkat kemiskinan yang dapat dicapai. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai peran penting dalam menekan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih produktif. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Pulau Sumatera tidak hanya dipengaruhi oleh capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan karakteristik wilayah, kualitas pembangunan manusia, dan kesenjangan kesejahteraan antarprovinsi. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan merata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dasar, serta penguatan sektor-sektor ekonomi bernilai tambah tinggi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *4*(2), 117–133. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.918>
- Attoma, I. D., & Matteucci, M. (2024). Measurement tools, applications, and their evolution over time through a systematic review of the literature up to 2019. *Quality & Quantity*, *58*(4). <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01792-8>
- Aza, R. S., & Nsyah. (2024). Income inequality analysis in Sumatra (Case study of South). *2*(4), 309–328. <https://doi.org/10.55927/fintech.v2i4.12046>
- Cerra, V., Lama, R., & Loayza, N. (2022). Growth and poverty. In *Oxford scholarship online*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192846938.003.0002>
- Destaria, N., & Ginting, A. (2023). Analisis pengaruh ketimpangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap kemiskinan di regional Kalimantan. *5*(1), 10–27.

- Firdaus, A., Dawood, T. C., & Abrar, M. (2021). Determinants of poverty in Indonesia: An empirical evidence using panel data regression. 2(4), 124–132. <https://doi.org/10.47194/ijgor.v2i4.90>
- Fitria, S. F. (2020). Analisis regresi data panel pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2013–2020. 119–128. <https://doi.org/10.29313/jrm.v1i2.377>
- Haemmerli, M., Jackson, T. P., Goodman, C., Thabrany, H., & Wiseman, V. (2021). Poor quality for the poor? A study of inequalities in service readiness and provider knowledge in Indonesian primary health care facilities. *International Journal for Equity in Health*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12939-021-01577-1>
- Hafizi, M. Z. (2023). *Dampak kemiskinan terhadap ketidaksetaraan pelayanan kesehatan di Indonesia*.
- Hamzah, et al. (2022). Determinants of poverty in 10 provinces in Sumatra Island. 2022(3), 1306–1320.
- Iffah, A., Saifudin, T., Ana, E., & Amelia, D. (2023). Poverty modeling in Indonesia: A spatial regression analysis. 12(4), 441–457. <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i4.66027>
- Karuna, E. E., Azza, A., & Darman, E. (2024). Model regresi data panel robust terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 93–100.
- Madsen, J., & Strulik, H. (2025). Taking Kuznets seriously. *July*. <https://doi.org/10.1007/s10887-025-09262-6>
- Mardhiyah, A. (2025). Determinant of income inequality: Empirical study of 34 provinces in Indonesia moderated by investment. 14(1), 334–354. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v14i1.2411>
- Marrero, G. A., & Servén, L. (2022). Growth, inequality, and poverty: A robust relationship? *Empirical Economics*, 63(2), 725–791. <https://doi.org/10.1007/s00181-021-02152-x>
- Mustika, C., & Nurjanah, R. (2021). Rural and urban poverty models on Sumatra Island. 9(1), 107–114. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.10684>
- Muttaqin, T. (n.d.). Determinants of unequal access to and quality of education in Indonesia. 1–23.
- Rahayu, H. C., Sarungu, J. J., Hakim, L., & Soesilo, A. M. (2020). Dynamic panel data analysis of poverty in Indonesia. 143(ISBEST 2019), 137–141. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200522.028>
- Safrinja, E., Andiny, P., Mardhani, M., & Safuridar, S. (2025). Analisis ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
- Samiani, S., Endang, E., Susilo, J. H., & Astuti, H. (2024). Dynamic panel data modeling of Indonesia's poverty level 2013–2022. 25(April). <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21079>
- Santi, E., Pravitasari, A. E., & Lubis, I. (2020). Mapping of spatial distribution and spatial autocorrelation patterns of poverty in all regencies/cities in Indonesia. 4(1), 271–282. <https://doi.org/10.30871/jagi.v4i1.1565>
- Satriawan, B., Ratih, A., & Yuliawan, D. (2025). Inequality, poverty, and human capability in

- Sumatra's inclusive growth. 4(1), 297–320. <https://doi.org/10.58526/jsret.v4i1.701>
- Shalma, E., Ratih, A., & Taher, Y. (2025). Exploring the determinants of poverty gap in Sumatra Island: A spatial regression approach. 3(6), 1683–1694.
- Shodiq, M., Riamto, W., & Donoriyanto, D. S. (2025). Analisis klaster kemiskinan 38 provinsi Indonesia berdasarkan pengaruh sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi. 65–76. <https://doi.org/10.33364/algorithm.v22i2.2223>
- Suresh, J. (2023). Poverty is lack of capabilities: A literature review. 7(2454), 462–476. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Wandita, D. T., Gunarto, T., & Ratih, A. (2022). The effect of economic multidimensional poverty growth. 1(9), 1413–1421.
- Yunita, I., & Gultom, P. (2025). Multidimensional determinants of poverty and regional clustering in North Sumatra, Indonesia: A factor and cluster-based analytical approach. 22(7), 209–217. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2025/v22i71073>